

# KOMITMEN INDONESIA PADA KTT G20 ARAB SAUDI DAN PEMBANGUNAN NASIONAL: SEBUAH TINJAUAN KOMPREHENSIF

Rizma Afian Azhiim, Gema Ramadhan Bastari, Nadia Zahara, Semmy Tyar  
Armandha, Dicky Adiatma, & Xandra Leonora

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya & Prakerti Collective Intelligence

Email: [rizma.afian.azhim@dsn.ubharajava.ac.id](mailto:rizma.afian.azhim@dsn.ubharajava.ac.id), [gemarbastari@gmail.com](mailto:gemarbastari@gmail.com),

[nadia.zahara@binus.ac.id](mailto:nadia.zahara@binus.ac.id), [semmytyar@gmail.com](mailto:semmytyar@gmail.com),

[202110415003@mhs.ubharajava.ac.id](mailto:202110415003@mhs.ubharajava.ac.id), & [xandra.leonora17@mhs.ubharajava.ac.id](mailto:xandra.leonora17@mhs.ubharajava.ac.id)

## ABSTRAK

Artikel ini mengkaji kebermanfaatan komitmen dalam deklarasi pemimpin negara pada KTT G20 tahun 2020 di Riyadh, Arab Saudi, bagi pembangunan nasional Indonesia. Metode analisis yang diaplikasikan dalam kajian ini terdiri dari analisis pemetaan, analisis teks kualitatif, dan analisis diskursus kritis. Melalui ketiga rangkaian metode analisis tersebut, kajian ini menghasilkan tiga identifikasi utama. Pertama, identifikasi komitmen dalam deklarasi pemimpin G20 Riyadh yang secara substansial memuat agenda pembangunan. Kedua, identifikasi komitmen G20 Arab Saudi yang seiring dan sejalan dengan prioritas pembangunan Indonesia. Ketiga, identifikasi komitmen bidang pembangunan yang memuat urgensi untuk diimplementasikan melalui diplomasi. Ketiga identifikasi tersebut setidaknya mengindikasikan dua hal. Pertama, 'sinkronisasi', yaitu penyesuaian antara agenda global dengan kebijakan, baik kebijakan yang telah ditetapkan maupun kebijakan yang dirumuskan. Kedua, adanya penyeimbangan kepentingan nasional dengan nilai-nilai yang dianggap sebagai Kebaikan Bersama Global.

**Kata kunci:** Grup Dua Puluh (G20), Pembangunan Internasional, Pembangunan Nasional, Indonesia.

## ABSTRACT

This study examines the usefulness of commitments in G20 Riyadh Summit Leaders' Declaration for Indonesian national development. The analytical method applied in this study consists of mapping analysis, qualitative text analysis, and critical discourse analysis. Through the three sets of analytical methods, this study develops three key identifications. First, identification of commitments in G20 Riyadh Summit Leaders' Declaration which substantially contains the development agenda. Second, identification of commitments in G20 Riyadh Summit Leaders' Declaration that are concomitant and in accordance with Indonesia's development priorities. Third, identification of commitments in development issue that urged to be implemented through diplomacy. The three identifications indicate at least two findings. First, 'synchronization', adjustments between the global agenda and policies, both policies that have been set and policies that have been formulated. Second, balance of national interests with values that are considered as the Global Common Goods.

**Keywords:** Group of Twenty (G20), International Development, National Development, Indonesia.

## PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan salah satu isu yang dibahas pada jalur pertemuan Sherpa (*Sherpa Track*) *Group of Twenty (G20)* dan menghasilkan komitmen dalam Deklarasi Pemimpin (*Leaders' Declaration*) (G20, 2020). Sebagai forum internasional yang merepresentasikan kekuatan ekonomi terbesar di dunia, G20 memiliki posisi penting dalam memastikan keberlangsungan perekonomian global. G20 setidaknya merepresentasikan 80 persen PDB global, 75 persen perdagangan internasional, dan 60 persen populasi dunia (G20, 2022).

Tingkat representasi tersebut menunjukkan bahwa negara-negara anggota G20, selain menjadi kunci keberlangsungan perekonomian global, juga menjadi aktor utama yang dapat berperan dalam merumuskan dan mengimplementasikan agenda pembangunan internasional.

Meskipun G20 tidak menghasilkan kesepakatan yang mengikat setiap negara anggota, namun berbagai penelitian dan kajian telah meninjau bagaimana komitmen-komitmen yang dihasilkan G20 dapat berperan dalam agenda pembangunan global. Negara anggota G20 memiliki kekuatan ekonomi yang cukup besar untuk mendorong kerjasama pembangunan bagi negara berkembang, baik melalui kerja sama bilateral (Ikenberry & Mo, 2013a; Marx, 2021), maupun melalui forum multilateral seperti Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) (Parlar Dal & Dipama, 2019). Inisiatif untuk mendorong kerja sama pembangunan tidak terlepas dari komitmen yang dihasilkan KTT G20, terutama komitmen-komitmen yang mendukung agenda pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) seperti transisi penggunaan energi baru dan terbarukan (Quitow et al., 2019), transformasi kebijakan jaminan sosial (Deacon, 2013), dan inovasi terhadap infrastruktur ekonomi digital (Biryukova & Daniltsev, 2019).

Beragam penelitian dan kajian yang memposisikan kekuatan ekonomi sebagai faktor penentu tingkat signifikansi komitmen G20 terhadap agenda pembangunan global secara umum fokus pada ‘peran’ negara anggota G20 dalam mengimplementasikan komitmen. Ragam penelitian dan kajian tersebut melihat bahwa keputusan dalam memanfaatkan posisi dan kekuatan ekonomi untuk menyukseskan agenda pembangunan didasarkan pada ‘inisiatif’ masing-masing negara untuk menindaklanjuti komitmen yang telah dideklarasikan dalam KTT G20. Perspektif tersebut kemudian menghadirkan persoalan yang perlu dikaji lebih lanjut, yaitu dalam kondisi apa negara-negara anggota G20 dapat berinisiatif untuk menindaklanjuti atau mengimplementasikan komitmen bidang pembangunan yang telah dideklarasikan pada KTT G20.

Selain kekuatan ekonomi dan substansi dari komitmen-komitmen yang dideklarasikan, beberapa penelitian menilai bahwa keberhasilan negara-negara G20 dalam mendorong kerjasama pembangunan ditentukan oleh kualitas kerangka kebijakan (*policy framework*) yang dihasilkan. Selaras dengan komitmen yang dideklarasikan, KTT G20 juga menghasilkan kerangka dan instrumen kebijakan, seperti kerangka kebijakan fiskal dan moneter (Filipović, 2012; Malpass, 2021); kerangka kebijakan investasi (Sakharov, 2016;

Svoboda, 2020), perdagangan (Jungbluth & Petersen, 2020), dan perindustrian (Kim & Sumner, 2021; Mai, 2018); kerangka kebijakan pertanian dan ketahanan pangan (Lele et al., 2021); dan kerangka kebijakan untuk mengatasi krisis (Atkinson, 2020; Ellison & van Berkel, 2014; Kantorowicz, 2020a; Srivastava, 2016). Beragam penelitian tersebut melihat bahwa inisiatif negara-negara anggota G20 untuk mengimplementasikan komitmen didukung oleh kerangka kebijakan yang dapat memberikan peta jalan dan panduan teknis dalam perumusan kebijakan nasional. Hal yang menjadi persoalan kemudian ialah, bagaimana KTT G20 dapat menghasilkan komitmen beserta kerangka kebijakan yang seiring dan sejalan dengan kepentingan nasional negara-negara anggota G20.

### **KERANGKA ANALISIS**

Sebagai suatu studi kasus kajian ini difokuskan untuk menganalisa komitmen G20 yang dimuat dalam Deklarasi Pemimpin G20 tahun 2020 di Riyadh, Arab Saudi, yang seiring dan sejalan dengan prioritas pembangunan Indonesia. ‘Seiring’ mengindikasikan adanya kesesuaian antara kebijakan nasional dengan komitmen G20. Kesesuaian tersebut tidak lepas dari ‘sinkronisasi’, yakni proses penyesuaian antara agenda global dengan kebijakan, baik kebijakan yang telah ditetapkan maupun kebijakan yang sedang dirumuskan (Nolle, 2010). Sedangkan ‘sejalan’ menandakan adanya proses menyeimbangkan kepentingan nasional dengan nilai-nilai yang dianggap sebagai Kebaikan Bersama Global (*Global Common Good*) (Fues & Messner, 2016). Komitmen yang seiring dan sejalan dengan prioritas pembangunan dapat memberikan manfaat dalam berbagai bentuk, mulai dari skema pembiayaan program kebijakan (Koreen et al., 2018; Paramati et al., 2017), panduan untuk merumuskan kebijakan (Joubin-Bret & Chiffelle, 2019), hingga kesepakatan untuk membuat kebijakan berbasis kerja sama antar negara (Berger & Liu, 2021; Callaghan et al., 2014; Vines, 2015).

Kesesuaian dan kebermanfaatannya komitmen G20 Arab Saudi bagi prioritas pembangunan nasional dapat dipahami dengan merefleksikan komitmen-komitmen yang dimuat dalam deklarasi pemimpin negara (*leaders declaration*) terhadap perencanaan pembangunan. Secara umum, refleksi komitmen G20 terhadap perencanaan pembangunan nasional dapat memberikan pemahaman mengenai “peran dan efektivitas KTT G20 terhadap keseimbangan pertumbuhan ekonomi” (Kantorowicz, 2020b), dan ‘kapasitas’ (Cooper, 2015; Ikenberry & Mo, 2013b) serta ‘kontribusi’ (Agarwal & Whalley, 2020; Faghieh & Sazegar, 2019) negara dalam mengimplementasikan agenda pembangunan global. Selain peran dan efektivitas G20, refleksi komitmen terhadap rencana pembangunan nasional juga

dapat mengidentifikasi keselarasan antara kepentingan nasional terkait pembangunan dengan agenda global tertentu seperti perubahan iklim (Damodaran, 2015; Malpass, 2021), energi (Ghosh, 2015; Li et al., 2018; Mehra & Datt, 2015; Wang & Dong, 2021), dan anti korupsi (Kobets, 2021).

Kajian terhadap komitmen G20 yang ‘seiring’ dan ‘sejalan’ dengan prioritas pembangunan Indonesia membutuhkan tiga proses identifikasi. Pertama, identifikasi dan pemetaan terhadap komitmen-komitmen dalam Deklarasi Pemimpin G20 tahun 2020 yang memuat agenda pembangunan. Kedua, identifikasi komitmen-komitmen di bidang selain pembangunan yang seiring dan sejalan dengan rencana pembangunan nasional. Ketiga, identifikasi komitmen di bidang pembangunan yang harus diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia melalui diplomasi. Ketiga proses identifikasi tersebut dihadirkan dalam kajian ini dengan tujuan untuk melacak sinkronisasi serta penyeimbangan antara kepentingan nasional dengan agenda global.

#### **METODE PENELITIAN**

Kajian ini dilaksanakan dalam tiga fase, yaitu: (1) fase pengumpulan data; (2) fase analisis data; dan (3) fase penulisan laporan hasil analisis. Pada fase pertama, penelitian ini akan melakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang terkait dengan G20 Riyadh tahun 2020, antara lain: Pengumpulan dokumen komitmen dalam G20 Riyadh Tahun 2020; Pengumpulan dokumen kebijakan, siaran pers, dan informasi kegiatan pemerintah (mulai dari presiden hingga kementerian/lembaga) pasca-G20 Riyadh 2020; dan Pengumpulan dokumen kebijakan pembangunan Indonesia.

Pada fase kedua, kajian ini akan menganalisis sejumlah data yang dikumpulkan pada fase pertama melalui berbagai metode. Pertama, kajian ini menggunakan analisis pemetaan, yaitu metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengorganisir pengetahuan melalui representasi visual (Wilson et al., 2016). Pemetaan meliputi proses penggambaran secara sistematis yang melibatkan pengumpulan data, dan fakta yang saling dihubungkan hingga memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap data dan fakta yang diperoleh (Rashid & Rigas, 2010). Pemetaan yang dilakukan dalam kajian ini meliputi pemetaan terhadap komitmen-komitmen para pemimpin negara pada Presidensi G20 Riyadh Tahun 2020 yang tercantum pada deklarasi. Selain itu, penelitian ini juga memetakan isu-isu prioritas dalam rencana pembangunan nasional sehingga dapat mengidentifikasi komitmen-komitmen

Pemerintah Republik Indonesia pada Presidensi G20 tahun 2020 yang sejalan dengan prioritas pembangunan Indonesia.

Setelah mengidentifikasi komitmen-komitmen Indonesia, penelitian ini menggunakan analisis teks kualitatif (*qualitative text analysis* - QTA) untuk memilah dan mereduksi data kualitatif menjadi kategori-kategori tematik dengan mengacu pada sebuah sistem kategorisasi yang telah ditentukan sebelumnya (Kuckartz, 2019). Metode ini kemudian akan diperkuat oleh metode analisis diskursus kritis (*critical discourse analysis* - CDA) untuk menelusuri dan mengungkapkan makna-makna yang tidak serta-merta ditampilkan secara harafiah oleh sebuah teks (Mullet, 2018). Dalam penelitian ini, metode QTA dan CDA akan diterapkan pada dokumen-dokumen yang terkait dengan G20 (termasuk, tetapi tidak terbatas pada deklarasi, komunike, minuta, laporan, kertas posisi, makalah akademik, artikel berita).

## **PEMBAHASAN**

**Komitmen dalam Deklarasi Pemimpin Negara G20 Arab Saudi Bidang Pembangunan**  
Isu pembangunan merupakan salah satu persoalan yang dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Riyadh pada tahun 2020. Berdasarkan Deklarasi Pemimpin G20, setidaknya terdapat tujuh komitmen pemimpin negara G20 yang berkaitan dengan isu pembangunan. Pertama, meningkatkan inisiatif untuk mendukung pembangunan dan industrialisasi di Afrika serta negara-negara terbelakang (*Least Developed Countries/LDCs*). Kedua, mendukung upaya mencapai infrastruktur berkualitas untuk konektivitas regional melalui '*Guidelines for Quality Infrastructure*'. Ketiga, mengupayakan untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan pembangunan berkelanjutan melalui *Financing For Sustainable Development Framework*. Keempat, mengupayakan berbagai kebijakan inklusif untuk memulihkan negara dari pandemi COVID-19 dan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan SDGs. Kelima, bertekad untuk tetap memegang peran penting dalam berkontribusi untuk pencapaian SDGs dan menekankan aksi kolektif dan konkret dalam implementasi SDGs. Keenam, dukungan terhadap negara berkembang dan miskin untuk menghadapi dampak COVID-19 terhadap ekonomi, kesehatan dan sosial, khususnya Afrika dan negara berkembang di pulau-pulau kecil. Ketujuh, mendukung respons dan upaya pemulihan dari COVID-19 di negara berkembang. Kedelapan, meningkatkan penggunaan teknologi dalam pembangunan infrastruktur.

**Tabel 1. Komitmen dalam Deklarasi Pemimpin G20 Tahun 2020 di Bidang Pembangunan**

No.	Komitmen	Kutipan	Sumber
1.	Meningkatkan inisiatif untuk mendukung pembangunan dan industrialisasi di Afrika serta negara-negara terbelakang ( <i>Least Developed Countries/LDCs</i> ).	<i>We reiterate our continued support for the G20 Initiative on Supporting the Industrialization in Africa and LDCs, G20 Africa Partnership and the Compact with Africa, and other relevant initiatives.</i>	Leaders' Declaration C22
2.	Mendukung upaya mencapai infrastruktur berkualitas untuk konektivitas regional melalui ' <i>Guidelines for Quality Infrastructure</i> '.	<i>We endorse ... the G20 Guidelines on Quality Infrastructure for Regional Connectivity, and the Financing for Sustainable Development Framework.</i>	Leaders' Declaration C22
3.	Mengupayakan untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan pembangunan berkelanjutan melalui <i>Financing For Sustainable Development Framework</i> .	<i>We endorse ... the Financing for Sustainable Development Framework.</i>	Leaders' Declaration C22
4.	Mengupayakan berbagai kebijakan inklusif untuk memulihkan negara dari pandemi COVID-19 dan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan SDGs.	<i>We endorse the G20 Menu of Policy Options to Enhance Access to Opportunities for All that can be leveraged to support the immediate response to the COVID-19 pandemic and move towards a strong, sustainable, balanced and inclusive recovery.</i>	Leaders' Declaration C22
5.	Bertekad untuk tetap memegang peran penting dalam berkontribusi untuk pencapaian SDGs dan menekankan aksi	<i>We remain resolved to play a leading role in contributing to the timely implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development and the Addis Ababa Action Agenda. Building on the</i>	Leaders' Declaration C22

No.	Komitmen	Kutipan	Sumber
	kolektif dan konkret dalam implementasi SDGs.	<i>G20 Action Plan on the 2030 Agenda for Sustainable Development, the Riyadh Update, with its new Accountability Framework, underscores the collective and concrete actions of the G20 contributing to the implementation of the 2030 Agenda and its Sustainable Development Goals.</i>	
6.	Dukungan terhadap negara berkembang dan miskin untuk menghadapi dampak COVID-19 terhadap ekonomi, kesehatan dan sosial, khususnya Afrika dan negara berkembang di pulau-pulau kecil.	<i>We remain determined to support all developing and least developed countries as they face the intertwined health, economic, and social effects of Covid-19, recognizing the specific challenges in Africa and small island developing states.</i>	Leaders' Declaration A2
7.	Mendukung respons dan upaya pemulihan dari COVID-19 di negara berkembang.	<i>We endorse the G20 Support to COVID-19 Response and Recovery in Developing Countries.</i>	Leaders' Declaration C22
8.	Meningkatkan penggunaan teknologi dalam pembangunan infrastruktur.	<i>We reiterate our continued support for the G20 Initiative on Supporting the Industrialization in Africa and LDCs, G20 Africa Partnership and the Compact with Africa, and other relevant initiatives.</i>	Leaders' Declaration C22

Sumber: Deklarasi Pemimpin G20 Tahun 2020 (G20, 2020)

Rencana untuk menindaklanjuti komitmen pemimpin negara di bidang pembangunan mengacu pada tiga dokumen kelompok kerja pembangunan (*Development Working Groups/DWG*) yang menjadi pelengkap Deklarasi Pemimpin G20. Pertama, rencana kerja G20 untuk mendukung negara-negara berkembang dalam merespon dan memulihkan negara dari kondisi pandemi (*G20 Support to COVID-19 Response and Recovery in Developing Countries*). Kedua, pedoman kualitas infrastruktur untuk membangun konektivitas regional (*G20 Guidelines on Quality Infrastructure for Regional Connectivity*). Ketiga, kerangka

pembiayaan untuk pembangunan berkelanjutan (*Financing for Sustainable Development Framework*).

Dokumen rencana kerja G20 untuk mendukung negara-negara berkembang dalam merespons dan memulihkan negara dari kondisi pandemi (*G20 Support to COVID-19 Response and Recovery in Developing Countries*) memuat lima hal. Pertama, prinsip-prinsip utama dalam mendukung negara-negara berkembang untuk merespons dan memulihkan negara dari pandemi COVID-19. Kedua, cakupan dukungan internasional bagi negara-negara berkembang dalam menghadapi pandemi, yaitu bantuan untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan, kesehatan, dan pembangunan berkelanjutan. Ketiga, agenda untuk mendukung rencana Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam merespons pandemi melalui bantuan kemanusiaan secara global (*United Nations (UN) Global Humanitarian Response Plan*) dengan estimasi kebutuhan dana sebesar US\$10,3 milyar. Keempat, agenda untuk mendukung rencana kerja Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam membantu negara-negara berkembang untuk mengakses komoditas dan layanan kesehatan sebagai respons atas kondisi darurat kesehatan global. Kelima, rencana tindak lanjut dalam mendukung negara-negara berkembang untuk dapat melakukan pemulihan negara melalui kebijakan yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan (*Strong, Inclusive, and Sustainable Recovery*).

Pedoman kualitas infrastruktur untuk membangun konektivitas regional (*G20 Guidelines on Quality Infrastructure for Regional Connectivity*) terdiri dari tiga hal utama. Pertama, pedoman tersebut menekankan pentingnya analisa risiko dan pengembalian modal dalam membangun infrastruktur. Kedua, arahan agar pembuat kebijakan memperhatikan kebutuhan dan ketersediaan infrastruktur yang berkaitan dengan konektivitas regional dalam jangka panjang. Ketiga, pedoman tersebut juga menekankan pentingnya kerja sama internasional untuk mendukung pembangunan konektivitas regional, baik melalui kerja sama antar negara maupun melalui organisasi internasional dan bank pembangunan multilateral. Adapun ketiga hal tersebut menjadi suatu komitmen untuk diadopsi dalam kebijakan perencanaan pembangunan di setiap negara anggota G20.

Kerangka pembiayaan untuk pembangunan berkelanjutan (*Financing for Sustainable Development Framework*) terdiri dari tiga pilar. Pertama, mobilisasi keuangan untuk pembangunan setidaknya harus diselaraskan dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diversifikasi aktivitas ekonomi, pengembangan teknologi digital, dan tolok ukur capaian serta cakupan dampak pembangunan yang rasional. Kedua, efisiensi dan



efektivitas dalam pembangunan infrastruktur harus ditingkatkan, terutama dalam penentuan sasaran dan besaran anggaran. Ketiga, pentingnya memperkuat kerja sama antar anggota G20 dalam membangun infrastruktur yang mendukung peningkatan konektivitas regional, baik melalui kerja sama antar negara secara langsung maupun melalui organisasi internasional dan bank pembangunan multilateral.

### **Keselarasan Komitmen G20 Arab Saudi dengan Prioritas Pembangunan Indonesia**

Dalam konteks pembangunan Indonesia, terdapat beberapa dokumen yang dapat diajukan acuan untuk merefleksikan komitmen G20 Arab Saudi, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Visi Indonesia 2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dan dokumen rencana kerja tahunan pemerintah yang memuat kebijakan pembangunan nasional. Kesesuaian antara komitmen pada Deklarasi Pemimpin G20 tahun 2020 dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional secara umum dapat ditinjau berdasarkan tujuh agenda prioritas pembangunan yang terdapat pada RPJMN 2020-2024, yaitu (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; (7) memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Terkait dengan prioritas pembangunan pertama, untuk “memperkuat ketahanan ekonomi”, maka dibutuhkan pengelolaan sumber pangan serta pertanian dan pengelolaan kemaritiman, kelautan serta perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, dan kehutanan. Selain itu, dibutuhkan akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian, perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif digital. Komitmen-komitmen dalam Deklarasi Pemimpin G20 Tahun 2020 yang sesuai dengan agenda ini, antara lain, komitmen terkait ketahanan pangan:

*“We reaffirm our commitment to tackling the challenges in food security and nutrition, as well as reinforcing the efficiency, resilience, and sustainability of food and agriculture supply-chains, especially in light of the effects of the pandemic (G20, 2020, p. 10)”.*

“Kami menegaskan kembali komitmen untuk mengatasi tantangan dalam ketahanan pangan dan gizi, serta memperkuat efisiensi, ketahanan, dan keberlanjutan rantai pasokan pangan dan pertanian, terutama mengingat dampak pandemi (G20, 2020, p. 10).”

Melalui komitmen untuk “menjamin ketahanan pangan dan gizi”, dan “meningkatkan investasi yang bertanggung jawab dalam sistem pertanian dan pangan”, Pemerintah Indonesia didorong untuk melakukan upaya-upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan dan pertanian yang menjadi landasan pembangunan ekonomi. Selain itu, komitmen-komitmen tersebut sejalan dengan arah kebijakan peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan yang dilakukan melalui, antara lain, peningkatan produktivitas, kesejahteraan SDM pertanian, peningkatan ketersediaan pangan, dan sebagainya.

Berbagai komitmen yang dimuat dalam Deklarasi Pemimpin G20 Tahun 2020 telah seiring dan sejalan dengan agenda prioritas pembangunan kedua, yaitu “mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan”. Pertama, komitmen Pemimpin G20 yang berkaitan dengan peningkatan investasi yang bertanggung jawab dalam sistem pertanian dan pangan:

*“A significant increase in responsible investment in agriculture and food systems is needed to meet the challenge of feeding the global population and we endorse the G20 Riyadh Statement to Enhance Implementation of Responsible Investment in Agriculture and Food Systems. We acknowledge the goal of voluntarily establishing intermediate country-specific targets to strengthen efforts towards halving global per capita food loss and waste by 2030 (G20, 2020, p. 10).”*

“Peningkatan signifikan dalam investasi yang bertanggung jawab di bidang pertanian dan sistem pangan diperlukan untuk memenuhi tantangan memberi makan populasi global dan kami mendukung pernyataan G20 Riyadh untuk Meningkatkan Implementasi yang Bertanggung Jawab dalam Sistem Pertanian dan Pangan. Kami mengakui tujuan untuk secara sukarela menetapkan target khusus negara perantara untuk memperkuat upaya menuju pengurangan separuh kehilangan dan pemborosan pangan per kapita global pada tahun 2030 (G20, 2020, p. 10).”

Pertumbuhan kawasan pertanian sebagai pusat produksi merupakan bagian dari pendekatan koridor pertumbuhan dan salah satu pendekatan yang digunakan untuk mencapai sasaran dan target pembangunan kewilayahan tahun 2020-2024. Kedua, komitmen untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas dan merata:

*“Inclusive, equitable and quality education for all, especially for girls, remains key to unlocking a brighter future and fighting inequalities (G20, 2020, p. 8).”*

“Pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas untuk semua, terutama untuk anak-anak perempuan, tetap menjadi kunci untuk membuka masa depan yang lebih cerah dan memerangi ketidaksetaraan (G20, 2020, p. 8).”

Komitmen tersebut sejalan dengan strategi penyediaan perluasan akses pelayanan dasar pendidikan untuk meningkatkan pemerataan antar wilayah dalam prioritas pembangunan. Ketiga, komitmen untuk mengatasi tantangan lingkungan hidup seperti degradasi lahan:

*“We launch the Global Coral Reef R&D Accelerator Platform to conserve coral reefs and the Global Initiative on Reducing Land Degradation and Enhancing Conservation of Terrestrial Habitats to prevent, halt, and reverse land degradation. Building on existing initiatives, we share the ambition to achieve a 50 percent reduction of degraded land by 2040, on a voluntary basis (G20, 2020, p. 9).”*

“Kami meluncurkan Platform Akselerator Litbang Terumbu Karang Global guna melestarikan terumbu karang; dan Inisiatif Global untuk Mengurangi Degradasi Lahan dan meningkatkan Konservasi Habitat Terrestrial guna mencegah, menghentikan, dan membalikkan degradasi lahan. Berdasarkan inisiatif yang ada, kami berbagi ambisi untuk mencapai pengurangan 50 persen lahan terdegradasi pada tahun 2040 secara sukarela (G20, 2020, p. 9).”

Komitmen tersebut sejalan dengan arah kebijakan untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dan ketahanan bencana. Implementasi komitmen-komitmen tersebut diharapkan bermanfaat untuk mewujudkan pemerataan dan pertumbuhan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah di Indonesia.

Deklarasi Pemimpin G20 Tahun 2020 telah membuat sejumlah komitmen yang secara spesifik berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan tenaga kerja, dan kapasitas kewirausahaan pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (G20, 2020). Komitmen-komitmen tersebut sangat sejalan dengan prioritas pembangunan ketiga, yaitu “meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing”. Melalui kualitas pendidikan, keterampilan tenaga kerja, dan kapasitas UMKM, Pemerintah Indonesia tidak hanya meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Indonesia dalam menciptakan lapangan kerja dan mengembangkan model-model bisnis inovatif-berkelanjutan, Pemerintah Indonesia juga akan mendorong transformasi ekonomi Indonesia dari bergantung pada Sumber Daya Alam menjadi berorientasi pada ekonomi kreatif.

Komitmen G20 dalam bidang pendidikan memiliki kesesuaian dengan agenda prioritas pembangunan keempat, yaitu “revolusi mental dan pembangunan kebudayaan”. Revolusi mental salah satunya diwujudkan melalui strategi peningkatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas yang sesuai dengan komitmen untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas dan merata (G20, 2020, p. 8). Selain itu, komitmen yang mengisyaratkan dukungan terhadap penciptaan lapangan kerja di bidang pariwisata melalui pemberdayaan komunitas lokal dan pelestarian budaya menghadirkan sinkronisasi antara kepentingan ekonomi dengan pelestarian budaya:

*“We endorse the G20 Guidelines for Inclusive Community Development through Tourism and encourage the use of the AIUIa Framework for Inclusive Community Development Through Tourism that aim to create jobs, empower local communities, especially rural, safeguard the planet, and preserve cultural heritage (G20, 2020, p. 8).”*

“Kami mendukung Pedoman G20 untuk Pengembangan Komunitas Inklusif melalui Pariwisata dan mendorong penggunaan kerangka kerja AIUIa untuk Pengembangan Komunitas Inklusif melalui Pariwisata yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja, memberdayakan masyarakat lokal, terutama pedesaan, menjaga planet, dan melestarikan warisan budaya (G20, 2020, p. 8).”

Sinkronisasi tersebut diharapkan dapat mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan di bidang pariwisata yang tidak hanya berpihak pada kepentingan bisnis, namun juga mengimplementasikan salah satu nilai kebaikan bersama global (*global common good*), yaitu pelestarian budaya.

Berbagai komitmen di bidang pembangunan, terutama yang berkaitan dengan “peningkatan kualitas infrastruktur” (G20, 2020, p. 7), telah seiring dan sejalan dengan prioritas pembangunan kelima, yaitu “memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar”. Selain itu, pelaksanaan komitmen untuk “meningkatkan akses ke jaringan internet yang aman dan terjangkau” (G20, 2020, p. 6) berkontribusi secara langsung bagi pembangunan infrastruktur yang akan menjadi landasan bagi revolusi industri keempat di wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak memiliki akses ke internet dan teknologi digital. Kehadiran internet akan menawarkan peluang yang tidak terhingga bagi daerah-daerah ini dan dapat berdampak tidak langsung bagi prioritas pembangunan Pemerintah Indonesia di bidang sumber daya manusia dan transformasi ekonomi.

Komitmen yang seiring dan sejalan dengan prioritas pembangunan keenam, yaitu “membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim”, adalah komitmen dalam bidang lingkungan hidup yang memuat upaya-upaya dalam menghadapi tantangan lingkungan seperti degradasi lahan, perubahan iklim, dan hilangnya keanekaragaman hayati (G20, 2020, p. 9). Selain itu, terdapat juga komitmen yang memuat upaya-upaya untuk pengurangan emisi:

*“We endorse the Circular Carbon Economy (CCE) Platform, with its 4Rs framework (Reduce, Reuse, Recycle and Remove), recognizing the key importance and ambition of reducing emissions, taking into account system efficiency and national circumstances. The CCE is a voluntary, holistic, integrated, inclusive, pragmatic, and complementary approach to promote economic growth while enhancing environmental stewardship through managing emissions in all sectors including, but not limited to, energy, industry, mobility, and food (G20, 2020, p. 9).”*

“Kami mendukung Platform *Circular Carbon Economy (CCE)*, dengan kerangka kerja 4R (*Reduce, Reuse, Recycle, dan Remove*), mengakui pentingnya untuk mengurangi emisi, dengan mempertimbangkan efisiensi sistem dan keadaan nasional. CCE adalah pendekatan sukarela, holistik, terintegrasi, inklusif, pragmatis, dan saling melengkapi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sambil meningkatkan pengelolaan lingkungan melalui pengelolaan emisi di semua sektor termasuk, namun tidak terbatas pada, energi, industri, mobilitas, dan makanan (G20, 2020, p. 9).”

Komitmen-komitmen tersebut sesuai dengan arah kebijakan untuk agenda keenam, yaitu peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan iklim, dan pembangunan rendah karbon. Selain itu, komitmen-komitmen tersebut juga sesuai dengan strategi-strategi yang dijalankan sesuai dengan arah kebijakan, seperti peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pencegahan kehilangan keanekaragaman hayati, penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan pengelolaan sampah, pemulihan lahan gambut dan ekosistem mangrove, peningkatan populasi spesies tumbuhan dan satwa liar, dan sebagainya. Implementasi komitmen-komitmen tersebut secara positif memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim.

Komitmen G20 yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi (G20, 2020, p. 21), sangat terkait dengan prioritas pembangunan “memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”. G20 telah mendorong perumusan strategi nasional antikorupsi, yang berarti mendorong upaya struktural untuk secara menyeluruh

memberantas praktik korupsi. Komitmen tersebut telah sejalan dengan Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK). Pada tahun 2021, fokus pelaksanaan Stranas PK ada pada tiga hal, yakni perizinan dan tata niaga, keuangan negara, dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Berdasarkan Laporan Pelaksanaan 2021, masih belum optimal ditandai dengan tingkat pencapaian yang masih di bawah 30% di setiap program. Ketidakefektifan ini menunjukkan bahwa walaupun secara kuantitatif Indonesia sudah memenuhi komitmen tersebut, namun secara kualitatif belum memadai.

### **Urgensi Implementasi Komitmen G20 Bidang Pembangunan Melalui Diplomasi**

Berdasarkan Deklarasi Pemimpin Negara pada KTT G20 Arab Saudi tahun 2020, terdapat setidaknya tiga komitmen yang perlu diimplementasikan melalui jalur diplomasi. Pertama, komitmen untuk “mendukung respons dan upaya pemulihan dari COVID-19 di negara berkembang”. Dukungan terhadap respons dan pemulihan COVID-19 di negara berkembang perlu dikomunikasikan dengan negara tujuan. Selain itu, kebijakan untuk mendukung respons dan pemulihan COVID-19 di negara lain dapat dilakukan melalui organisasi atau lembaga internasional. Salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mendukung respons dan pemulihan dari COVID-19 di negara lain, terutama negara berkembang dan *Least Developed Countries (LDCs)*, dilaksanakan melalui penyaluran dana bantuan. Bantuan tersebut diberikan pada 2021, baik langsung melalui pemerintah negara yang bersangkutan seperti maupun melalui lembaga kemanusiaan internasional. Selain memberikan hibah atau dana bantuan secara langsung, Indonesia juga dapat mendorong anggota-anggota G20 untuk meningkatkan kontribusi pendanaan pada organisasi internasional, terutama pendanaan yang berkaitan dengan agenda respons dan pemulihan negara-negara berkembang dari COVID-19, seperti pada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) (WHO Executive Board, 2021).

Kedua, komitmen “mendukung upaya mencapai infrastruktur berkualitas untuk konektivitas regional melalui *G20 Guidelines for Quality Infrastructure*”. Konektivitas ekonomi dalam suatu kawasan membutuhkan kerja sama negara-negara yang berada di kawasan tersebut. Pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas setidaknya memerlukan (1) kesepahaman bersama mengenai pentingnya pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas kawasan; (2) dukungan bantuan teknis dan pendanaan. Kesepahaman bersama mengenai pembangunan infrastruktur dan konektivitas kawasan dapat dicapai melalui berbagai forum dialog ekonomi dan pembangunan, baik yang

dilaksanakan secara bilateral maupun multilateral. Sedangkan dukungan modal pembangunan dapat diimplementasikan melalui *Global Infrastructure Hub (GI Hub)*, suatu organisasi nirlaba yang didirikan oleh G20 dengan tugas memajukan penyediaan infrastruktur yang berkelanjutan, tangguh, dan inklusif (GI Hub, 2021a).

Ketiga, komitmen “meningkatkan inisiatif untuk mendukung pembangunan dan industrialisasi di Afrika serta negara-negara terbelakang (*Least Developed Countries/LDC*). Dukungan terhadap pembangunan industrialisasi di Afrika dan negara-negara terbelakang dapat diimplementasikan setidaknya melalui beberapa upaya. Pertama, melakukan dialog dengan negara-negara yang bersangkutan, baik secara bilateral maupun melalui forum kerja sama seperti Kerja sama Triangular Selatan-Selatan (KSST) maupun melalui Konferensi Asia Afrika (KAA). Dialog tersebut dapat diarahkan pada agenda pembahasan mengenai hambatan, tantangan, ataupun kendala dalam industrialisasi. Kedua, meningkatkan inisiasi bantuan teknis ataupun pendanaan dalam pembangunan infrastruktur dari anggota-anggota G20. Bantuan tersebut dapat diberikan melalui *Infrastructure Consortium for Africa (ICA)* ataupun melalui bank pembangunan seperti *African Development Bank* dan *Islamic Development Bank*.

Kanal Diplomasi Ekonomi untuk menindaklanjuti implementasi komitmen Indonesia pada KTT G20 2020 di bidang pembangunan terdiri dari dua jenis. Pertama, kanal dialog untuk membahas permasalahan, kendala, dan tantangan di bidang pembangunan. Selain melalui KTT G20, dialog mengenai pembangunan dapat dilaksanakan melalui pertemuan bilateral maupun forum pertemuan dan kerja sama multilateral seperti pertemuan menteri dan KTT ASEAN, Konferensi Asia Afrika (KAA) dan Kerja sama Selatan-Selatan Triangular (KSST). Pertemuan tingkat menteri ASEAN yang membidangi urusan ekonomi, industri, perdagangan, dan pembangunan dapat membahas agenda kerja sama pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas kawasan Asia Tenggara. Sementara KAA dan KSST dapat mewadahi dialog mengenai permasalahan, kendala, dan tantangan yang berkaitan dengan industrialisasi di negara-negara Afrika dan LDCs.

Kedua, kanal fasilitator dalam menginisiasikan bantuan teknis dan bantuan pendanaan dalam pembangunan. Sejauh ini G20 telah membuat langkah konkret dengan mendirikan *Global Infrastructure Hub (GI Hub)*, yaitu organisasi nirlaba yang fokus dalam memajukan penyediaan infrastruktur yang berkelanjutan, tangguh, dan inklusif (GI Hub, 2021b). Organisasi nirlaba tersebut telah melakukan *monitoring* kualitas dan pembiayaan infrastruktur secara rutin, menerbitkan panduan pembangunan konektivitas kawasan,

menyelenggarakan *Africa Infrastructure Fellowship Program* (AIFP), dan memfasilitasi forum pertemuan *Infrastructure Bodies* (I-Bodies), yaitu forum internasional yang membahas perencanaan strategis terkait pembangunan infrastruktur. G20 perlu membahas lebih lanjut mengenai posisi dan peran GI Hub dalam mendukung pembangunan industrialisasi di Afrika dan negara-negara LDCs. Secara strategis, KTT G20 dapat membahas bagaimana relasi dan kerja sama antara GI Hub dengan *Infrastructure Consortium for Africa* (ICA) yang diinisiasi oleh G8.

## KESIMPULAN

Kebermanfaatan komitmen G20 merepresentasikan kualitas dan fakta tentang bagaimana komitmen yang dihasilkan melalui KTT G20 menjadi berguna, bermanfaat, atau berfaedah. Kebermanfaatan komitmen G20 tidak hanya didasarkan pada inisiatif negara-negara anggota untuk mengimplementasikan komitmen atau tingkat kekuatan negara-negara anggota untuk menindaklanjuti komitmen yang dideklarasikan. Akan tetapi, juga didasarkan pada kemampuan untuk menilai keuntungan yang didapatkan berdasarkan kepentingan nasional. Kajian ini telah menunjukkan bagaimana Indonesia dapat melakukan penyesuaian antara agenda KTT G20 dengan kebijakan nasional di bidang pembangunan. Penyesuaian tersebut didasarkan pada penyeimbangan kepentingan nasional dalam prioritas pembangunan dengan *global common goods*. Keseimbangan antara kepentingan nasional dengan agenda global menunjukkan bahwa kebermanfaatan merupakan hal yang dinamis dan partikular, tergantung pada kondisi sosial, ekonomi, dan politik setiap negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agarwal, M., & Whalley, J. (2020). *What Realistically Can the G20 Contribute to Development?* (pp. 53–73). [https://doi.org/10.1142/9789811214752\\_0004](https://doi.org/10.1142/9789811214752_0004)
- Atkinson, C. (2020). G20 leaders must answer to COVID-19. *Science*, 368(6487), 111–111. <https://doi.org/10.1126/science.abc1025>
- Berger, A., & Liu, W. (2021). Can the G20 serve as a launchpad for a multilateral investment agreement? *The World Economy*, 44(8), 2284–2302. <https://doi.org/10.1111/twec.13114>
- Biryukova, O., & Daniltsev, A. (2019). When Cooperation Fails: the Global Governance of Digital Trade. *International Organisations Research Journal*, 14(1), 7–20. <https://doi.org/10.17323/1996-7845-2019-01-01>
- Callaghan, M., Ghate, C., Pickford, S., & Rathinam, F. (2014). Global Cooperation Among G20 Countries: Responding to the Crisis and Restoring Growth. In *Global Cooperation Among G20 Countries* (pp. 1–21). Springer India. [https://doi.org/10.1007/978-81-322-1659-9\\_1](https://doi.org/10.1007/978-81-322-1659-9_1)



- Cooper, A. F. (2015). G20 Middle Powers and Initiatives on Development. In *MIKTA, Middle Powers, and New Dynamics of Global Governance* (pp. 32–46). Palgrave Macmillan US. [https://doi.org/10.1057/9781137506467\\_3](https://doi.org/10.1057/9781137506467_3)
- Damodaran, A. (2015). The Co-benefit Principle and the Durban Platform: Towards an Inclusive Framework for Negotiating Climate Finance. In P. Shome (Ed.), *The G20 Development Agenda* (pp. 161–182). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781316134580.007>
- Deacon, B. (2013). The social protection floor and global social governance: Towards policy synergy and cooperation between international organizations. *International Social Security Review*, 66(3–4), 45–67. <https://doi.org/10.1111/issr.12018>
- Ellison, M., & van Berkel, R. (2014). Innovative social and labour market policies in Europe in times of crisis. *International Social Security Review*, 67(2), 1–9. <https://doi.org/10.1111/issr.12035>
- Faghih, N., & Sazegar, M. (2019). *Globalization Development Within the Group of Twenty (G20) as Indicated by Globalization and Innovation Indices* (pp. 15–48). [https://doi.org/10.1007/978-3-030-14370-1\\_2](https://doi.org/10.1007/978-3-030-14370-1_2)
- Filipović, M. (2012). G20 and the World Economic Policy: Agenda Development. *Serbian Political Thought*, 6(2), 83–101. <https://doi.org/10.22182/spt.622012.5>
- Fues, T., & Messner, D. (2016). The G20: Balancing National Interests with the Global Common Good. *China Quarterly of International Strategic Studies*, 02(03), 293–309. <https://doi.org/10.1142/S2377740016500172>
- G20. (2020, November 22). *G20 Riyadh Leaders' Declaration*. [http://www.g20.utoronto.ca/2020/G20\\_Riyadh\\_Summit\\_Leaders\\_Declaration\\_EN.pdf](http://www.g20.utoronto.ca/2020/G20_Riyadh_Summit_Leaders_Declaration_EN.pdf)
- G20. (2022). *About The G20*. G20 Indonesia 2022.
- Ghosh, P. (2015). Should India Join the International Energy Agency? In P. Shome (Ed.), *The G20 Development Agenda* (pp. 256–300). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781316134580.010>
- GI Hub. (2021a). *About the GI Hub*. Global Infrastructure Hub.
- GI Hub. (2021b). *Global Infrastructure Hub Annual Report 2020-21*. <https://cdn.gihub.org/umbraco/media/4326/gi-hub-annual-report-fy20-21.pdf>
- Ikenberry, G. J., & Mo, J. (2013a). Korea and Emerging International Development Cooperation Regime. In *The Rise of Korean Leadership* (pp. 73–94). Palgrave Macmillan US. [https://doi.org/10.1057/9781137351128\\_5](https://doi.org/10.1057/9781137351128_5)
- Ikenberry, G. J., & Mo, J. (2013b). Middle-Power Leadership and the Evolution of the G20. In *The Rise of Korean Leadership* (pp. 17–30). Palgrave Macmillan US. [https://doi.org/10.1057/9781137351128\\_2](https://doi.org/10.1057/9781137351128_2)
- Joubin-Bret, A., & Chiffelle, C. R. (2019). G20 Guiding Principles for Global Investment Policy-making. In *China's International Investment Strategy* (pp. 329–344). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198827450.003.0018>
- Jungbluth, C., & Petersen, T. (2020). *Which Way Forward? The Role of Free Trade for the Development of the World Economy* (pp. 3–29). [https://doi.org/10.1142/9789811214776\\_0001](https://doi.org/10.1142/9789811214776_0001)
- Kantorowicz, J. (2020a). *The Role and Effectiveness of the G20* (pp. 337–358). [https://doi.org/10.1007/978-3-030-21603-0\\_17](https://doi.org/10.1007/978-3-030-21603-0_17)
- Kantorowicz, J. (2020b). *The Role and Effectiveness of the G20* (pp. 337–358). [https://doi.org/10.1007/978-3-030-21603-0\\_17](https://doi.org/10.1007/978-3-030-21603-0_17)

- Kim, K., & Sumner, A. (2021). Bringing state-owned entities back into the industrial policy debate: The case of Indonesia. *Structural Change and Economic Dynamics*, 59, 496–509. <https://doi.org/10.1016/j.strueco.2021.10.002>
- Kobets, P. N. (2021). International cooperation of G20 in preventing corruption: dialectics of development. *Actual Problems of Economics and Law*, 15(1). <https://doi.org/10.21202/1993-047X.15.2021.1.94-105>
- Koreen, M., Laboul, A., & Smaini, N. (2018). *G20/OECD Effective Approaches for Implementing the G20/OECD High-Level Principles on SME Financing*. <https://doi.org/10.1787/329168b6-en>
- Kuckartz, U. (2019). Qualitative Text Analysis: A Systematic Approach. In G. Kaiser & N. Presmeg (Eds.), *Compendium for Early Career Researchers in Mathematics Education* (pp. 181–197). Springer Open.
- Lele, U., Baldwin, B. C., & Goswami, S. (2021). Changing Global Governance Context for Food Security and Nutrition. In *Food for All* (pp. 284–336). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198755173.003.0006>
- Li, H., Li, F., Shi, D., Yu, X., & Shen, J. (2018). Carbon Emission Intensity, Economic Development and Energy Factors in 19 G20 Countries: Empirical Analysis Based on a Heterogeneous Panel from 1990 to 2015. *Sustainability*, 10(7), 2330. <https://doi.org/10.3390/su10072330>
- Mai, N. T. T. (2018). Resource Allocation to Upgrade the Economic Structure: Experience from South Korea's Industrial Policy. *VNU Journal of Science: Economics and Business*, 34(4). <https://doi.org/10.25073/2588-1108/vnueab.4190>
- Malpass, D. (2021). *Remarks at the G20 International Tax Symposium - Fiscal Policies to Integrate Climate and Development*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/35939>
- Marx, A. (2021). Development cooperation. In *The Routledge Handbook of Europe–Korea Relations* (pp. 180–190). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429491351-17>
- Mehra, M. K., & Datt, D. (2015). Revisiting Fossil–Fuel Subsidies in the Context of Ongoing G20 Dialogue. In P. Shome (Ed.), *The G20 Development Agenda* (pp. 203–255). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781316134580.009>
- Mullet, D. R. (2018). A General Critical Discourse Analysis Framework for Educational Research. *Journal of Advanced Academics*, 29(2), 116–142. <https://doi.org/10.1177/1932202X18758260>
- Nolle, D. E. (2010). U.S. Domestic and International Financial Reform Policy : Are G20 Commitments and the Dodd-Frank Act in Sync? *International Finance Discussion Paper*, 2010(1024), 1–57. <https://doi.org/10.17016/IFDP.2010.1024>
- Paramati, S. R., Apergis, N., & Ummalla, M. (2017). Financing clean energy projects through domestic and foreign capital: The role of political cooperation among the EU, the G20 and OECD countries. *Energy Economics*, 61, 62–71. <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2016.11.001>
- Parlar Dal, E., & Dipama, S. (2019). G20 rising powers' status seeking through social creativity: The case of South-South development cooperation. *South African Journal of International Affairs*, 26(4), 663–684. <https://doi.org/10.1080/10220461.2019.1697737>
- Quitow, R., Thielges, S., Goldthau, A., Helgenberger, S., & Mbungu, G. (2019). Advancing a global transition to clean energy – the role of international cooperation. *Economics*, 13(1). <https://doi.org/10.5018/economics-ejournal.ja.2019-48>

- Rashid, S., & Rigas, D. (2010). An Empirical Two-Group Study into Electronic Note-Taking. *The Open Virtual Reality Journal*, 2(1), 1–7. <https://doi.org/10.2174/1875323x01002010001>
- Sakharov, A. (2016). A Policy Framework for Investment: An International Tool for Improving the Global Investment Regime. *International Organisations Research Journal*, 11(4), 07–35. <https://doi.org/10.17323/1996-7845-2016-04-07>
- Srivastava, D. K. (2016). G20: Impact of the Crisis with Special Reference to India and International Burden Sharing. In *The G20 Development Agenda* (pp. 86–126). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781316134580.005>
- Svoboda, O. (2020). Julien Chaisse (ed.): China's International Investment Strategy: Bilateral, Regional, and Global Law and Policy. *Czech Journal of International Relations*, 55(2), 73–75. <https://doi.org/10.32422/mv.1697>
- Vines, D. (2015). Cooperation between countries to ensure global economic growth: a role for the G20? *Asian-Pacific Economic Literature*, 29(1), 1–24. <https://doi.org/10.1111/apel.12109>
- Wang, Q., & Dong, Z. (2021). Does financial development promote renewable energy? Evidence of G20 economies. *Environmental Science and Pollution Research*, 28(45), 64461–64474. <https://doi.org/10.1007/s11356-021-15597-5>
- WHO Executive Board. (2021). *Status of collection of assessed contributions, including Member States in arrears in the payment of their contributions to an extent that would justify invoking Article 7 of the Constitution*.
- Wilson, J., Mandich, A., & Magalhães, L. (2016). Concept mapping: A dynamic, individualized and qualitative method for eliciting meaning. *Qualitative Health Research*, 26(8), 1151–1161. <https://doi.org/10.1177/1049732315616623>